

Abul Fatih Ristiyan

BIMBINGAN ULAMA MENYIKAPI PENGUASA DI ERA - MODERN.

Yayasan Cinta Sedekah

Bimbingan Ulama Menyikapi Penguasa di Era Modern

Abul Fatih Ristiyan



**Bimbingan Ulama Menyikapi Penguasa di Era
Modern**

Penulis

Abul Fatih Ristiyan

Penyunting

Sekretariat Yayasan Cinta Sedekah

Desain Cover

Tim Desain Yayasan Cinta Sedekah

Ukuran

xiv, 64 hlm, Uk 14x20 cm

Cetakan Pertama :

Juni 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Dilarang mengubah apapun isi tulisan tanpa izin dari penulis.

Hak cipta dilindungi Undang-undang.

All rights reserved

YAYASAN CINTA SEDEKAH

Jl. Nyi Ageng NIS, KG/511

Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta

Website: www.cintasedekah.org

E-mail: sekretariat@cintasedekah.org

Muqaddimah

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya dan meminta ampun kepada-Nya, dan kami berlindung dari kejelekan diri kami dan keburukan amalan kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang dibiarkan sesat, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam.”

(QS Ali Imran 102)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan perhatikanlah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

(QS An Nisa 4)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا () يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ
 لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah mendapat kemenangan yang besar.”

(QS Al Ahzab 70-71)

Amma Ba'du:

Sesungguhnya Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- tidaklah wafat melainkan telah meninggalkan syariat Islam yang lengkap dan terang benderang bagi kita semua. Tidak ada yang berpaling dari petunjuk beliau melainkan pasti binasa.

Seorang muslim harus meyakini bahwa petunjuk terbaik adalah petunjuk beliau -shallallahu 'alaihi wasallam-, dan harus meyakini bahwa setiap perintah dan larangan beliau pasti yang terbaik untuk umatnya, karena beliau tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya melainkan semua itu wahyu dari Allah Ta'ala.

Di antara petunjuk yang beliau tinggalkan kepada kita adalah tentang muamalah kepada penguasa, bagaimana cara menasehatinya, bagaimana jika penguasa tersebut berlaku sewenang-wenang, dan lain sebagainya.

Selanjutnya petunjuk beliau -shallallahu 'alaihi wasallam- itu diemban oleh para ulama Rabbani dari waktu ke waktu sampai di masa kita sekarang.

Buku ini ditulis dalam rangka menghimpun penjelasan para ulama dalam menjabarkan petunjuk beliau - shallallahu ‘alaihi wasallam- sebagai bentuk bimbingan bagi kaum muslimin di masa sekarang.

Maka penjelasan ulama yang dikutip di buku ini lebih banyak berasal dari ulama kontemporer seperti Syaikh Al Albani, Syaikh Ibnu Utsaimin, Syaikh Ibn Baz, Syaikh Shalih Al Fauzan, dan lain-lain. Dengan itu diharapkan penjelasan akan lebih mengena karena mereka hidup di zaman yang sama dengan kita.

Apa yang akan ditulis dalam pembahasan ini mencakup beberapa bagian utama:

Bagian Pertama: Kaidah Penerimaan Berita

Bagian ini ditulis untuk menanggapi fenomena sebagian orang yang bermudah-mudah dalam menerima dan menyebarkan berita, serta membicarakan berita-berita tentang kebijakan pemerintah.

Bagian Kedua: Amar Ma’ruf Nahi Munkar kepada Penguasa

Bagian ini dimaksudkan untuk mereka yang mengomentari segala sesuatu di dunia maya dengan dalih amar ma'ruf dan nahi munkar.

Bagian Ketiga: Kaidah Maslahat-Mafsadat

Bagian ini ditulis untuk mereka yang hanya mengejar satu tujuan berupa kemaslahatan namun tidak mempertimbangkan mafsadat atau kerusakan yang ditimbulkannya.

Bagian Keempat: Mengenai Murji'ah

Bagian ini untuk membantah mereka yang bermudah-mudah menjuluki saudaranya dengan sebutan Murji'ah karena mengingatkan mereka tentang aqidah ketaatan kepada penguasa.

Hanya kepada Allah kami memohon agar Dia menjadikan amal kami murni mengharap wajah-Nya Yang Mulia, dan bermanfaat bagi kaum muslimin, serta menjadi tabungan untuk hari akhir.

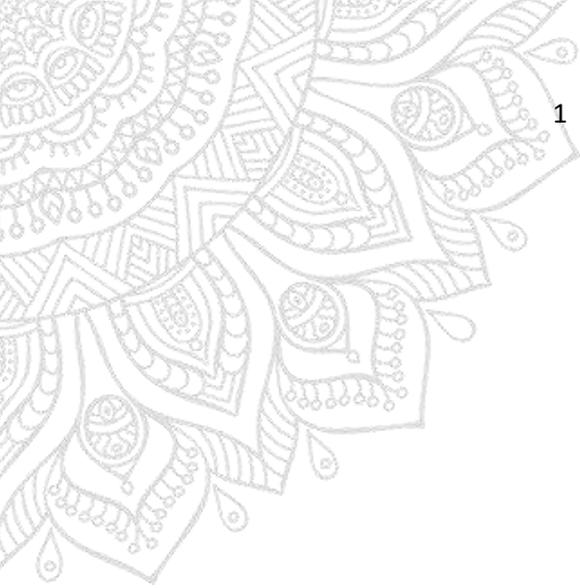
Yogyakarta, 25 Ramadhan 1441 H

Abul Fatih Ristiyan

DAFTAR ISI

Muqaddimah	vi
DAFTAR ISI	xi
Bagian Pertama	1
Kaidah Penerimaan Berita	1
Urutan dalam Menerima Berita	2
Larangan Menyebarkan Berita Keamanan dan Ketakutan.....	8
Kaidah Penerimaan Berita dalam Al Quran	11
Membahas Politik Di Hadapan Masyarakat Awam	14
Bagian Kedua	18
Amar Ma’ruf Nahi Munkar kepada Penguasa	18
Kaidah Umum dalam Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar.....	19
Mengingkari Kemungkaran Penguasa secara Terbuka	24
Nahi Munkar terhadap Pejabat Pemerintahan.....	30
Fatwa Syaikh Shalih Al Fauzan	33

Menasehati Pemerintah di Mimbar-Mimbar.....	33
Mengkritik Penguasa di Atas Mimbar Ataupun di Depan Mereka?	37
Menasehati Pejabat di Media Sosial	41
Ghibah Terhadap Pemerintah.....	42
Kriteria Bolehnya Menasehati Pemerintah Secara Terbuka.....	45
Bagian Ketiga	51
Pertimbangan Maslahat dan Mafsadat.....	51
Berpikir Sebelum Berbicara	52
Bagian Keempat.....	58
Mengenai Murji'ah	58
Komentar Para Ulama tentang Julukan Murji'ah.....	59



Bagian Pertama

Kaidah Penerimaan Berita

Urutan dalam Menerima Berita

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin mengatakan:

Wajib bagi seseorang ketika mendengar berita tentang seseorang agar memastikan kebenaran kutipannya.

Karena kadang penukilannya tidak benar, dan ini sering terjadi. Dan sering kita dengar suatu perkataan disandarkan kepada masyayikh atau pemerintah atau selainnya, yang kalau kita teliti ternyata itu dusta dan tidak ada sumbernya. Atau kadang ada sumbernya tapi ditambah-tambahi.

Ini adalah ujian yang berat. Maka kewajiban pertama adalah meneliti kebenaran kutipan. Jika terbukti benar, bahwa Fulan berkata demikian, apakah dia seorang pemimpin ataukah ulama atau menteri atau orang biasa, maka kita merenung terlebih dahulu sebelum membicarakannya. Kita renungkan apakah perkataannya tersebut punya sisi argumentasi yang bisa dibenarkan?

Apakah dia bentuk ijtihad yang bisa salah dan bisa juga benar? Karena kadang kita menyalahkan sesuatu padahal dia benar. Renungkanlah, sebelum kita berani mengingkari suatu perkataan yang disandarkan kepada seseorang atau semisalnya.

Dan banyak pula yang kutipannya benar, bahwa orang ini mengatakan demikian atau melakukan demikian, kemudian kita merenungkan bahwa ternyata apa yang dikatakannya ada sisi yang bisa dibenarkan atau dimaklumi. Jika ada sisi yang bisa dibenarkan -walaupun banyak orang tidak memahaminya-, maka dia bukan orang yang berhak untuk diingkari. Karena dia melakukannya atas ijtihad. Dan tidak ada seorangpun di antara kita yang perkataannya menempati kedudukan wahyu yang perkataan atau perbuatannya pasti benar. Karena Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- telah wafat.

Maka jika kita telah memastikan kebenaran sebuah kutipan, kemudian kita dapat ada sisi yang bisa dibenarkan maka hendaknya kita diam tidak berbicara.

Kalau kita tidak menemukan pembenaran dan pemakluman dari yang dia katakan, maka barulah kita berbicara.

Akan tetapi bagaimana caranya?

Apakah caranya dengan kita menyebarkannya di tengah-tengah manusia, dengan kita mengatakan: Ini lho Fulan demikian-demikian..?

Tidak. Yang wajib adalah nasehat dengan cara hikmah, yaitu kita datangi dia dan katakan: "Engkau mengatakan demikian dan melakukan demikian, ini adalah keliru dan menyelisihi firman Allah 'Azza Wajalla, atau menyelisihi sabda Nabi, atau menyelisihi kesepakatan ulama.. Maka bagaimana bisa engkau mengatakan atau melakukan hal tersebut?"

Dan tidak boleh secara mutlak membuatnya tersebar, terutama jika berita itu terkait ulama atau pemerintah.

Karena jika engkau menyebarkan kesalahan seorang ulama, maka pada hakikatnya engkau tidak hanya berbuat buruk kepadanya secara personal seperti orang pada umumnya, akan tetapi engkau menyandarkan

keburukan tersebut kepada ilmu yang ia bawa dan syariat yang dia dakwahkan.

Karena ulama jika telah jatuh wibawanya di mata manusia, perkataannya tidak lagi diperhitungkan dan orang tidak lagi percaya padanya. Ketika itu terjadi maka hilanglah sebagian syariat yang ada melalui ulama ini karena satu kesalahan yang dilakukan. Dan tidak ada orang yang maksum dari kesalahan.

Sehingga dengan perbuatan semacam itu engkau telah telah menyia-nyiakan kebaikan yang banyak. Maka ini kejahatan besar yang tidak hanya menyangkut seseorang namun juga syariat Allah 'Azza wajalla yang dia bawa.

Begitu pula dengan pemimpin, jika engkau menyebarkan kesalahan-kesalahannya maka engkau berbuat buruk tidak hanya kepadanya namun juga kepada keamanan negeri.

Hal ini karena yang menjaga keamanan negeri adalah mereka, dan orang-orang yang diberikan kekuasaan untuk menghukum dan mengatur urusan. Jika engkau sebarkan kesalahan mereka maka wibawa mereka akan

turun di mata manusia, dan mereka akan seperti orang biasa yang tidak diperhatikan baik perintahnya maupun larangannya. Maka ketika itu terjadi, keamanan akan terganggu dan terjadi pemberontakan/huru-hara.

Maka menyebarkan kesalahan ulama akan menyebabkan pembangkangan terhadap syariat yang dibawa dan disampaikan ulama tersebut. Sedangkan menyebarkan kesalahan pemerintah akan menyebabkan pembangkangan kepada mereka dan menyerang tatanan yang dibangun masyarakat berupa keamanan dan kebebasan. Maka perbuatan ini adalah kejahatan besar. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman (yang artinya) : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga ulil amri di antara kalian.” (QS An Nisa 59)

....

Secara ringkasnya, yang wajib kita lakukan terhadap berita-berita yang kita dengar, ada tiga tahapan:

Pertama: Tatsabbut (memastikan kebenaran berita)

Kedua: Taammul (merenung/berpikir)

Ketiga: Menghadapnya dan menasehatinya. Bukan malah menyiarkan dan menyebarkannya. Terutama jika berita tersebut mengenai ulil amri, baik itu ulama maupun pemerintah atau selain mereka.¹

¹ <http://binothaimeen.net/content/2812>

Transkrip:

<https://audio.islamweb.net/audio/index.php/index.php?page=FullContent&full=1&audioid=111439>

Larangan Menyebarkan Berita Keamanan dan Ketakutan

Syaikh Shalih Al Fauzan berkata:

"Maka wajib bagi seorang muslim untuk menahan diri dari berbagai berita aktual dan menyebarkannya serta menakut-nakuti masyarakat dengannya, atau membuatnya beredar di kalangan mereka. Ini perilaku orang-orang munafik. Merekalah yang berburu rumor lalu menyebarkannya untuk menakut-nakuti dan meneror kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman:

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين

"Kalaulah mereka keluar bersama kalian, mereka tidak akan menambahkan apapun bagi kalian selain kekacauan, mereka mencari-cari fitnah di dalam tubuh kalian dan di antara kalian ada yang suka mendengarkan mereka. Dan Allah Maha Mengetahui akan orang-orang zhalim." [QS At Taubah 69]

Dan firman-Nya:

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليم

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar kekejian itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih.." [QS An Nuur 19]

Ini adalah peringatan yang sangat keras. Maka seorang muslim tidak semestinya menjadi tukang menyebarkan desas-desus dan kabar buruk yang menakut-nakuti kaum muslimin. Dan apabila kabar atau kejadian itu mengandung bahaya bagi kaum muslimin dan membutuhkan tindakan pencegahan, maka hal itu **bukan dengan cara menyebarkannya di tengah masyarakat, yang mana mereka tidak punya kemampuan untuk itu.**

Caranya hanyalah dengan mengembalikannya ke ulil amri, menyerahkannya ke pemerintah agar melakukan tindakan dan mencegah bahayanya. Allah Ta'ala berfirman:

وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا

"Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka menyiarkannya. Kalau saja mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri). Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentu kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kalian." [QS an-Nisa: 83]²

² <http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13593>

Kaidah Penerimaan Berita dalam Al Quran

Allah Ta'ala berfirman:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

"Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka menyiarkannya. Kalau saja mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri). Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentu kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kalian." (QS an-Nisa: 83)

Syaikh 'Abdurrahman As Sa'di menjelaskan:

"Ayat ini berisi pelajaran bagi setiap orang bahwa perbuatan seperti yang disebutkan dalam ayat tidak patut

dilakukan. Seharusnya mereka mengecek dan tidak terburu-buru menyiarkan informasi penting dan berita-berita yang menyangkut politik dan keamanan. Hendaknya mereka mengkonfirmasikannya kepada Rasul dan ulil amri (dalam hal ini ulama dan umara'), orang-orang yang punya pandangan luas, ilmu, dan pikiran matang.

Merekalah yang mengetahui duduk persoalannya dan mengetahui untung ruginya. Jika menurut mereka penyiaran berita itu menguntungkan umat, memotivasi, dan mencegah dari bahaya musuh barulah boleh disiarkan. Jika menurut mereka tidak ada untungnya atau ruginya lebih besar dari untungnya, berarti berita itu tidak boleh disiarkan. Oleh sebab itu Allah mengatakan:

لَعَلَّمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

"tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri)"

Yakni, para ulama dapat mengambil sikap dan kebijaksanaan dengan pemikiran dan pandangan mereka yang tepat serta dengan ilmu mereka yang lurus."

(Taisir Karimir Rahman (II/112-114))

Membahas Politik Di Hadapan Masyarakat Awam

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin ditanya:

Banyak majelis yang membicarakan masalah politik di dalamnya. Ketika mereka dinasehati agar tidak melakukan demikian, mereka mengatakan: “politik itu bagian dari agama“. Bahkan terkadang mereka terjatuh dalam perbuatan ghibah. Dan yang membedakan majelis mereka (dengan majelis politik lainnya) adalah di dalamnya terdapat dzikrullah. Bagaimana pendapat anda mengenai orang yang duduk dalam majelis tersebut?

Jawab:

Saya berpandangan bahwa berbicara mengenai politik di halaman masyarakat awam itu adalah sebuah kesalahan. Karena politik itu ada orang-orang khusus yang kompeten membahasnya. Yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan. Adapun menyebarkan masalah politik di kalangan orang awam dan di majelis-majelis, ini menyelisihi petunjuk salafus

shalih. Tidak pernah Umar bin Khathab, dan juga khalifah sebelum beliau yaitu Abu Bakar radhiallahu'anhum, membahas masalah politik di hadapan masyarakat banyak, yang pembahasan tersebut diikuti oleh orang kecil, orang besar, orang pandai dan orang bodoh. Sama sekali tidak pernah! Dan tidak mungkin menjalankan politik dengan cara demikian. Politik itu memiliki orang-orang khusus yang berpengalaman di dalamnya, yang memahami masalah dan mereka dikenal kompetensinya. Mereka juga memiliki hubungan dengan luar negeri, juga dalam negeri, yang wawasan seperti ini tidak diketahui kebanyakan orang.

Tidak semestinya para pemuda, dan juga yang selain para pemuda, mencurahkan dan menysia-nyiakan waktu mereka dalam al qiil wal qaal (baca: isu-isu politik) seperti ini, yang tidak faidahnya sama sekali. Dalam masalah politik, terkadang suatu action dari seseorang (dari pejabat, atau pemerintah, red.) itu tampak salah bagi kita namun bagi dia itulah action yang benar.

Karena ia mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Dan perkara yang demikian ini nyata dan fakta.

Dan orang-orang yang gemar membicarakan politik umumnya mereka menyimpulkan sesuatu dari sumber berita yang tidak ada asalnya dan tidak ada faktanya. Melainkan sekedar waham (imajinasi) yang pikiran mereka, kemudian mereka membangun pendapat dan pembicaraan di atasnya. Sehingga mereka pun mengikuti sesuatu dengan tanpa ilmu. Allah Ta'ala berfirman:

{ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ { مَسْنُوءًا }

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban” (QS. Al Isra: 36).

Adapun mengenai bermajelis dengan mereka, jika memang majelis mereka isinya adalah dzikrullah, maka silakan bermajelis dengan mereka. Namun jika mereka mulai membicarakan masalah ini (politik) yang tidak ada faidah di dalamnya, maka yang pertama dilakukan

adalah menasehati mereka. Jika mereka mau mendengar nasehat, inilah yang diharapkan. Jika tidak, maka tinggalkan mereka.

Kemudian juga jika kehadiranmu dalam majelis mereka yang diklaim sebagai majelis dzikir, bisa membuat mereka tertipu dengan diri mereka sendiri atau bisa membuat orang-orang lain tertipu, sehingga dikatakan: “kalau majelis ini tidak baik, tentu si Fulan dan si Fulan tidak akan menghadirinya”, maka janganlah menghadiri majelis tersebut walaupun tujuanmu untuk menghadiri majelis dzikir. Karena pintu-pintu dzikir itu banyak walhamdulillah.³

³ <https://muslim.or.id/27783-membahas-politik-di-hadapan-masyarakat-awam.html>

Bagian Kedua

Amar Ma'ruf Nahi Munkar kepada Penguasa

Kaidah Umum dalam Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar

Amar ma'ruf memerintahkan kepada kebaikan) dan nahi munkar (melarang dari kemungkaran) adalah kewajiban seorang muslim.

Syaikh Shalih Al 'Ushaimi menjelaskan mengenai tiga kaidah dalam Nahi Munkar:

Kaidah 1: Suatu kemungkaran selamanya mungkar. Tidak akan berubah keharamannya sampai hari kiamat. Maka wajib bagi setiap orang untuk berusaha mengangkat kemungkaran tersebut **sesuai tingkatan kemampuannya** (tangan, lisan, dan hati).

Kaidah 2: Mengingkari kemungkaran dengan tidak dengan menyebarkannya. Karena hal tersebut termasuk aurat kaum muslimin. Wajib bagi seorang hamba berusaha menutupinya. Sebagian salaf mengatakan:

من أشاع منكرا فقد أعان على هدم الإسلام

"Siapa yang menyebarkan kemungkaran, maka dia telah membantu menghancurkan Islam"

Maka, yang diperbuat sebagian orang dengan menukil dan menyebarkan foto-foto kemungkaran di media sosial, ini haram dalam syariat. Karena hal tersebut termasuk menyiarkan kemungkaran.

Dan cara mengangkat kemungkaran bukan dengan cara seperti ini, dan hendaknya dia ubah kemungkaran tersebut sesuai syariat. Sedangkan ini bukan cara yang diajarkan syariat.

Kaidah 3: Mengingkari kemungkaran tidak boleh dijadikan jalan untuk memecah persatuan kaum muslimin dan menjauhkan rakyat dari penguasanya.

Karena sebagian orang ada yang menjadikan inkarul munkar sebagai sarana untuk tujuan tersebut. Maka mereka memecah persatuan kaum muslimin dan menjauhkan manusia dari mendengar dan taat kepada penguasa.

Maka di sini ada dua kewajiban:

1. Inkarul munkar

2. Tetap mendengar dan taat kepada penguasa, dan bersatu.

Dengan ini maka terwujudlah persatuan kaum muslimin sekaligus hilangnya kemungkarannya di dalamnya.⁴

⁴ Demikianlah yang dilakukan oleh Imam Ahmad -rahimahullah- ketika beliau mendapati pemimpin yang zalim dan memaksakan kekufuran kepada rakyatnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan:

"Imam Ahmad tidak memvonis kafir secara individu pada penganut Jahmiyyah, dan tidak pula pada yang beliau sebut sebagai seorang Jahmiy, atau pada yang menyepakati Jahmiyyah dalam sebagian bid'ah mereka. Bahkan beliau shalat di belakang para penguasa Jahmiyyah yang mendakwahkan bid'ahnya dan menguji manusia dengan aqidah tersebut serta menghukum orang yang tidak sepakat dengan aqidah itu dengan hukuman yang berat. Beliau dan yang semisal beliau tidak mengkafirkannya.

Bahkan beliau mengakui keimanan dan keimanan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, dan berpendapat untuk shalat lima waktu di belakang mereka, berhaji dan berperang bersama mereka, dan melarang untuk memberontak kepada mereka sebagaimana hal itu juga merupakan pendapat para imam selain beliau. Beliau mengingkari bid'ah yang mereka ada-adakan itu, yang merupakan kekufuran yang amat besar, walaupun mereka tidak mengetahui kalau itu kekufuran. Beliau mengingkarinya dan berjuang untuk membantahnya sebisa beliau.

Dengan itu beliau menggabungkan antara ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menampakkan sunnah dan agama serta mengingkari bid'ah Jahmiyyah yang sesat, dengan menjaga hak-hak kaum muslimin dari kalangan pemimpin dan rakyatnya, walaupun mereka bodoh dan pelaku bid'ah, zalim dan juga fasik.." [Majmu' Fatawa 7/507-508]

Maka ketika ada kemungkaran, seseorang langsung saja menyebutkan hukumnya tanpa menyebut pelakunya. Misal: Nyanyian itu haram, musik itu haram, dll. tanpa menyebutkan detail kejadiannya, supaya tidak malah menimbulkan kemungkaran yang lain.

Para ulama, mereka juga melakukan nahi munkar kepada penguasa, tapi mereka tidak butuh pengeras suara atau pengumuman kepada manusia kalau mereka melakukannya. Mereka hanya butuh untuk membebaskan diri dari kewajiban untuk menasehati, dan mencapai tujuan nahi munkarnya (yaitu terangkatnya kemungkaran, pent)."⁵

Saya (penulis) berkata: Perhatikanlah kaidah emas di atas! Sebab, orang yang melakukan nahi munkar tanpa menjaga persatuan kaum muslimin bersama imam mereka, akan menyerupai Khawarij. Dan sebaliknya, yang tidak mau melakukan nahi munkar karena alasan menghindari fitnah, maka mereka menyerupai Murji'ah. Sedangkan Ahlus Sunnah berada di antara keduanya,

⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=JHKPMRRPRPg>

yaitu melakukan nahi munkar dengan tetap menjaga hak-hak penguasa dan wibawa mereka.⁶

⁶ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah -rahimahullah- mengatakan:

أهل البدع من الخوارج والمعتزلة يرون قتال أئمة الجور والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم، أو ما ظنوه هم ظلماً، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وآخرون من المرجئة وأهل الفجور قد يرون ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظناً أن ذلك من باب ترك الفتنة

“Ahli bid’ah dari kalangan Khawarij dan Mu’tazilah membolehkan memerangi penguasa yang sewenang-wenang dan memberontak mereka ketika mereka berbuat zhalim, atau yang mereka anggap kezhaliman. Mereka lakukan itu berdalih amar ma’ruf nahi munkar.

Sedangkan golongan lain dari kalangan Murji’ah dan para pendosa, mereka tidak mau melakukan amar ma’ruf nahi munkar karena menyangka bahwa itu termasuk perbuatan menjauhi fitnah”. (Majmu’ Fatawa 28/168)

Mengingkari Kemungkaran Penguasa secara Terbuka

Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin menyampaikan:

"Kami tidaklah mengatakan untuk jangan mengingkari kemungkaran. Akan tetapi kami katakan, janganlah menyerang pemerintah. Karena hal ini tiada manfaat. Mereka tidak akan dapat manfaat dengan serangan semisal itu. Karena setan bisa saja memasukkan ke dalam pikiran mereka, hal-hal yang terpikir atau tidak terpikir dalam benakmu. Karena sebagian sebagian orang yang mengingkari kemungkaran -Wallahu a'lam atas niat mereka-, bermaksud untuk mengambil alih kekuasaan. Kami tidak tahu-menahu, Wallahu a'lam, kami terlepas diri dari yang semisal ini.

Akan tetapi, ingkarilah kemungkaran. Misal: bank itu haram. Apakah termasuk tindakan bijak jika menyerang penguasa dengan mengatakan: "Kenapa pemerintah membiarkan bank-bank itu padahal haram?"

Ataukah yang bijak itu semisal: "Wahai manusia, berhati-hatilah dengan bank, jangan bermuamalah dengannya, boikotlah bank."

Mana yang lebih bermanfaat bagi masyarakat? Tentu cara yang kedua yang lebih bermanfaat.

Atau misalnya, keberadaan musik baik di radio atau di selainnya. Apakah termasuk cara hikmah jika menyerang Menteri penyiaran dengan perkataan semisal: "Engkau lakukan ini, atau tinggalkan, atau yang semisalnya?"

Ataukah cara yang hikmah itu, Anda katakan: "Wahai manusia hati-hatilah dengan alat musik karena sesungguhnya itu haram. Jangan terpedaya karena banyak manusia yang melanggarnya dan mendengarkannya, atau karena radio banyak menyiarkannya. Karena ini mengkonsekuensikan dihalalkannya apa yang Allah haramkan. Dan mengingatkan mereka serta menjelaskan dalil-dalil yang melarang.

Mana yang lebih bermanfaat bagi masyarakat? Tak diragukan lagi bahwa yang terakhir inilah yang bermanfaat.

Dan aku tidak mengatakan dalam hal ini untuk diam. Nasehati mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika petunjuk itu sampai, maka itu untuk semuanya. Jika tidak sampai, maka engkau telah selamat dan terbebas dari beban. Dan siapa yang menuduh bahwa dengan ini kami menginginkan terbiarkannya kemungkaran dan diam darinya, maka ini tidak benar."

[Penjelasan beliau atas Kitab Ash shiyam dari Kitab Al Kafi, kaset kedua, side B]⁷

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya: Apakah mengoreksi para penguasa melalui mimbar termasuk manhaj para salaf (ulama terdahulu)? Bagaimana cara mereka menasehati para penguasa?

Beliau menjawab:

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=LlalkxzAMDE> menit ke 36:38

Mengekspos aib para penguasa dan mengungkapkannya di atas mimbar tidak termasuk manhaj para ulama dahulu, karena hal ini bisa menimbulkan kekacauan dan mengakibatkan tidak dipatuhi dan didengarnya nasehat untuk kebaikan, di samping dapat melahirkan kondisi berbahaya dan sama sekali tidak berguna.

Cara yang dianut oleh para ulama dahulu adalah dengan memberikan nasehat secara khusus, yaitu antara mereka dengan para penguasa, atau dengan tulisan, atau melalui para ulama yang biasa berhubungan dengan mereka untuk mengarahkan kepada kebaikan.

Mengingkari kemungkaran tidak perlu dengan menyebutkan pelaku. Mengingkari perbuatan zina, riba dan sebagainya, tidak perlu dengan menyebutkan pelakunya, cukup dengan mengingkari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut dan memperingatkannya kepada masyarakat tanpa perlu menyebutkan bahwa si fulan telah melakukannya. Hakim pun tidak boleh menyebutkan begitu, Apalagi yang bukan hakim. Ketika terjadi suatu fitnah di masa pemerintahan Utsman, ada orang yang bertanya kepada Usman bin Zaid

Radhiyallahu ‘anhu : “Tidakkah engkau memprotes Utsman?” la menjawab, “Aku tidak akan memprotesnya di hadapan masyarakat, tapi aku akan memprotesnya antara aku dengan dia, aku tidak akan membukakan pintu keburukan bagi masyarakat”

Tatkala orang-orang membeberkan keburukan di masa pemerintah Utsman Radhiyallahu ‘anhu, yang mana mereka memprotes Utsman dengan terang-terangan, sehingga merebaklah petaka, pembunuhan dan kerusakan, yang sampai kini masih membayang pada ingatan manusia, hingga terjadinya fitnah antara Ali dengan Mu’awiyah, lalu terbunuhnya Utsman dan Ali karena sebab-sebab tersebut dan terbunuhnya sekian banyak shahabat dan lainnya karena protes yang terang-terangan dan menyebutkan aib dengan terang-terangan, sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat terhadap pemimpin mereka, yang akhirnya membunuh sang pemimpin. Semoga Allah memberikan keselamatan

kepada kita semua. [Huququr Ra' i war Ra'iyah, hal. 27-28, Syaikh Ibnu Baz]⁸

⁸ <https://almanhaj.or.id/2448-mengoreksi-para-penguasa-dari-atas-mimbar.html>

Nahi Munkar terhadap Pejabat Pemerintahan

Syaikh Sulaiman Ar Ruhaily ditanya:

Apa saja kriteria penguasa yang berlaku padanya hukum-hukum syariat terkait ulil amri?

Beliau menjawab:

Pertanyaan di atas terkait dengan pada menteri dan pejabat, apakah mereka ulil amri?

Hukum asalnya waliyyul amr adalah pemimpin tertinggi di suatu negeri. Kemudian kekuasaannya bercabang sesuai dengan wilayah/kewenangan.

Maka siapa yang berwenang atas suatu wilayah/kewenangan, maka dia wajib didengar dan ditaati sesuai dengan kewenangannya. Menteri sesuai bidangnya, dan pejabat sesuai wilayah administrasinya.

Akan tetapi dengan dua syarat:

- Bukan dalam maksiat

- Tidak menyalahi peraturan negara atau peraturan pemerintah yang lebih tinggi darinya.

Maka ketika ada kerusakan, maka bagaimana cara menyelesaikannya?

Yang benar dari para ulama, ketika ada kerusakan, semisal permasalahan publik, walaupun bukan dari penguasa tertinggi **maka tidak boleh mengingkarinya terang-terangan yang provokatif.**

Walaupun itu sumbernya dari menteri, atau yang lainnya berupa permasalahan publik. Maka wajib untuk dinasehati atau disurati.

Adapun menuliskannya di media massa, maka itu memprovokasi rakyat dan membuat mereka lari. Maka tidak boleh dalam masalah publik untuk mengingkari terang-terangan.

Meskipun sebagian ulama mengatakan, hal itu berlaku untuk pemimpin saja dan bukan menteri dan di bawahnya, akan tetapi yang benar bahwa hikmah dari larangan tersebut adalah juga ada pada wakil-wakil mereka. Karena pengingkaran terhadap mereka juga

akan mengarah kepada pemimpin dan juga negeri ini, dan kepada provokasi serta hal-hal yang tidak diinginkan.

Dan sebagian pengikut hawa nafsu memanfaatkan perkataan ulama dalam hal ini untuk memprovokasi orang awam untuk membenci penguasa mereka.⁹

⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=90OjLrXqngY>

Fatwa Syaikh Shalih Al Fauzan

Menasehati Pemerintah di Mimbar- Mimbar

Syaikh Shalih Al Fauzan ditanya: Bagaimana hukumnya mengingkari pemerintah di mimbar-mimbar, khutbah jumat, dan selainnya?

Jawab:

"Ini termasuk maksiat dan keluar dari ketaatan kepada penguasa melalui perkataan. Pemberontakan itu ada yang memakai senjata, ada yang menggunakan kata-kata.

Kalaupun tidak dengan senjata, maka tetap tidak boleh seperti ini. Yang wajib adalah mendoakan kebaikan untuk mereka, dan agar diberikan taufik dan kemudahan.

Waliyyul amri muslim, tidak boleh mengingkarinya terang-terangan. Jika engkau ada nasehat yang ingin disampaikan kepadanya, sampaikan sebagaimana sabda Nabi untuk menarik tangannya dan katakan padanya.

Kalau diterima syukur, kalau tidak, engkau telah melakukan kewajibanmu.

Pemerintah punya kehormatan, tidak boleh meremehkan mereka dan mengingkari terang-terangan."¹⁰

Syaikh Shalih Al Fauzan ditanya: Apakah pemberontakan kepada penguasa itu hanya dengan pedang atau bisa juga dengan mencela mereka, memprovokasi rakyat untuk melawan dan mendemo mereka?

Beliau menjawab:

"Pemberontakan kepada pemimpin kadang dengan pedang, dan ini yang paling berat, kadang dengan perkataan, yaitu dengan mencaci mereka, menghina mereka, dan membicarakan mereka di majelis-majelis dan mimbar, hal ini akan memprovokasi manusia dan menghasut mereka untuk memberontak pada ulil amri, dan merendahkan kedudukan mereka di sisi rakyat, dan

¹⁰<https://www.youtube.com/watch?v=Bcx5S7SPmhk>

ini termasuk pemberontakan. Maka, benar, dengan berkata-kata pun termasuk pemberontakan."¹¹

Syaikh 'Abdul 'Aziz Ar Rajihi ditanya:

"Apakah pemberontakan terhadap penguasa itu hanya dengan pedang saja, ataukah juga dengan lisan? Seperti mereka yang mengkritik kezhaliman, atau mereka yang menuntut pemberantasan kemungkaran secara terang-terangan, melalui media massa dan tivi kabel?"

Jawaban beliau:

"Benar, pemberontakan bisa melalui senjata, dan juga bisa dengan menyebutkan aib-aib penguasa dan menyebarkannya melalui surat kabar, atau di atas mimbar, atau melalui internet, jaringan/web atau selainnya. Hal ini karena menyebutkan aib-aib akan membuat masyarakat menjadi marah terhadap penguasa, kemudian menjadi sebab terjadinya pemberontakan terhadap mereka.

¹¹ <http://www.alfawzan.af.org.sa/node/4898>

Para pemberontak Amirul Mukminin 'Utsman - radhiyallahu 'anhu-, mereka memulainya dengan menyebarkan aib-aib beliau kepada masyarakat...

kemudian Syaikh menyebutkan contoh-contoh isu yang disebarkan para pemberontak 'Utsman

Maka tidak boleh bagi seseorang untuk menyebarkan aib, karena hal ini termasuk jenis pemberontakan juga. Ketika aib-aib disebarkan di atas mimbar, atau di surat kabar dan majalah, atau di situs berita, maka masyarakat akan marah dan menghasut untuk melawan pemerintah, maka mereka pun memberontak padanya."¹²

¹² Syarh Al Mukhtar fi Ushul As Sunnah hal. 289

Mengkritik Penguasa di Atas Mimbar Ataukah di Depan Mereka?

Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin dalam khutbah Jum'ah beliau yang bertema fitnah koran dan majalah, mengatakan:

"Membicarakan aparat pemerintahan di atas mimbar adalah tindakan yang tidak didukung akal sehat dan tidak diperintahkan oleh syariat. Cara seperti itu tidak ada gunanya. Dan segala sesuatu yang tidak gunanya termasuk dalam sabda Nabi:

"Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya"

dan sabda Nabi:

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik atau diam"¹³

Di tempat lain, Syaikh Ibnu 'Utsaimin mengatakan:

¹³ Fatwa Haula Fitnah Al Jaraa-id wal Majallat

"Sesungguhnya mengingkari kemungkaran yang tersebar adalah hal yang dituntut dan tidak ada masalah dalam hal ini. Tapi yang menjadi masalah dalam pembahasan kita adalah pengingkaran terhadap seorang penguasa, seperti jika seseorang berpidato di masjid, kemudian ia berkata misalnya, "Negara (pemerintahnya) ini telah berbuat zhalim", "Pemerintah telah melakukan (kesalahan)", ia terus berbicara tentang kemungkaran penguasa dengan cara terang-terangan ini, padahal para penguasa tersebut tidak hadir dalam majelis itu.

Jelas berbeda jika pemimpin atau penguasa yang ingin engkau nasihati itu ada di hadapan Anda dan ketika dia tidak ada. Karena semua pengingkaran secara terang-terangan yang dilakukan oleh generasi Salaf terjadi langsung di hadapan pemimpin atau penguasa. Bedanya, jika ia hadir, memungkinkan baginya untuk membela diri dan menjelaskan sisi pandangannya, dan bisa jadi ia yang benar dan kita yang salah. Akan tetapi jika ia tidak hadir, tentunya ia tidak bisa membela diri dan ini termasuk kezhaliman. Maka wajib bagi setiap kita untuk tidak berbicara tentang kejelekan seorang penguasa

tatkala ia tidak hadir. Olehnya, jika engkau sangat menginginkan kebaikan (bagi seorang penguasa) pergilah kepadanya, temuilah ia, lalu nasihati secara empat mata."¹⁴

Di kesempatan lain, beliau menjelaskan:

"Tidak boleh bagi kita untuk berbicara di depan umum yang menimbulkan efek kebencian terhadap pemerintah, dan termasuk apa saja yang membuat orang murka kepada mereka, karena pada hal semacam ini terdapat kerusakan yang besar. Bagi seseorang, ini tampak seperti bentuk semangat, dan termasuk menyampaikan kebenaran secara terang-terangan. Padahal menyampaikan kebenaran tidaklah dilakukan di belakang layar.

Menyampaikan kebenaran di depan penguasa itu caranya adalah dia ada di depanmu dan engkau sampaikan: "Anda melakukan ini dan itu padahal itu tidak boleh.. Tinggalkanlah!" atau katakan "Hal ini wajib..". Adapun jika engkau berbicara mencela pemerintah di

¹⁴ Lihat Liqo' Al-Babil Maftuh, pertemuan ke-62, hal. 46

belakangnya serta mengumpatnya, maka hal ini bukanlah menyampaikan kebenaran. Bahkan hal ini termasuk kerusakan. Ini termasuk hal yang akan mengobarkan kebencian dan pembangkangan terhadap mereka, dan hal itu bisa mengarah kepada yang lebih besar lagi yaitu pemberontakan terhadap mereka. *wal 'iyadzu billah..*"¹⁵

Syaikh Muqbil Al Wadi'iy menjelaskan:

“Patut dibedakan antara mengingkari kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyelisihi al Qur'an dan sunnah di atas podium dengan melakukan agitasi agar rakyat memberontak terhadap pemerintah. Agitasi untuk memberontak itu tidak diperbolehkan kecuali jika kita melihat pemerintah memiliki kekafiran yang nyata.”¹⁶

¹⁵ Syarh Riyadhhis Shalihin 3/668

¹⁶ Tuhfatul Mujib hal 170

Menasehati Pejabat di Media Sosial

Dr. Umar Al Umar berkata:

Saya bertanya kepada guru kami Al 'Allamah Shalih Al Fauzan hari ini, tanggal 24 Jumadal Akhirah 1441 di kantor beliau:

Apa hukum menggunakan media sosial (medsos) sebagai sarana menasehati secara terang-terangan para pejabat pemerintahan?

Beliau menjawab: Tidak boleh. Ini metode yang keliru. Yang benar adalah menasehati secara rahasia antara yang menasehati dengan yang dinasehati.¹⁷

¹⁷https://twitter.com/dr_omaralomar/status/1229831769148530688

Ghibah Terhadap Pemerintah

Imam Ibnu 'Utsaimin mengatakan:

"Begitu pula ghibah terhadap pemerintah, yang Allah jadikan mereka berkuasa atas manusia, maka ghibah terhadap mereka berlipat ganda. Karena ghibah kepada mereka melazimkan peremehan terhadap mereka di mata masyarakat dan jatuhnya wibawa mereka.

Jika wibawa mereka telah jatuh, maka negeri akan rusak, dan akan muncul fitnah dan kekacauan, kejelekan dan kerusakan. Walaupun yang mengghibah pemerintah ini menginginkan perbaikan, akan tetapi kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada perbaikannya.

Dan apa yang diakibatkan oleh ghibah kepada pemerintah tersebut menjadi dosa yang lebih besar dari dosa yang mereka lakukan. Karena ketika kedudukan penguasa menjadi rendah di hati manusia, maka rakyat akan bersikap menentang kepada pemerintah, dan tidak peduli ketika mereka menyelisih dan memisahkan diri dari pemerintah. Dan ini tidak diragukan lagi bukan

merupakan perbaikan. Bahkan ia merupakan kerusakan dan gangguan bagi keamanan, serta agen penebar kekacauan."

[Fatawa Nur 'Ala ad Darb]

Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin ditanya:

Pada masa sekarang ini banyak terjadi ghibah ke penguasa. Maka apa hukumnya mengghibah penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah?

Jawab:

Ghibah penguasa itu haram, dari dua sisi:

Pertama, bahwa itu termasuk ghibah seorang muslim. Sedangkan Allah berfirman (yang artinya) : "Dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain." [Al Hujurat 12]

Kedua, bahwa menggunjing penguasa itu akan menimbulkan kejelekan dan kerusakan yang tidak akan timbul jika mengghibah orang biasa. Karena ketika orang biasa yang digunjing, maka kejelekan yang timbul

itu terbatas pada dirinya sendiri. Akan tetapi jika yang digunjing adalah penguasa, maka akan menjadikan manusia benci kepadanya, dan tidak mau patuh padanya, serta tidak mau mendengar himbauan serta perintahnya. Ini adalah mudharat yang besar yang melazimkan kekacauan, dan bahkan perang di antara manusia.

Adapun penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dikatakan: Mengingkari perbuatan berhukum dengan hukum selain Allah ke penguasa, tapi tidak secara terbuka. Karena tidak ada faidahnya mengingkari secara terbuka. Tapi ingkarilah di depan penguasa itu sendiri, dan tulis surat kepadanya. Kalau seseorang bisa langsung ke penguasa, itulah yang diharapkan. Tapi jika tidak bisa, maka tulis surat nasehat lewat yang bisa menyampaikannya ke penguasa.¹⁸

¹⁸ <http://ar.alnahj.net/sites/default/files/audio/othaimeen-ghebat-mn-lm-y7km-bma-anzel-allah--120b.mp3>

Kriteria Bolehnya Menasehati Pemerintah Secara Terbuka

Syaikh Sulaiman Ar Ruhailiy berkata:

Tidak diragukan lagi, bahwa setiap orang yang berakal pasti tahu bahwa menasehati anak tidaklah sama dengan menasehati bapaknya.

Seandainya bapakmu melakukan suatu kemungkaran, dan anakmu pun melakukan hal yang sama, misalnya bapakmu merokok, dan anakmu pun merokok, maka orang yang berakal akan tahu bahwa engkau tidak akan menesehati anakmu dengan cara seperti engkau menasehati bapakmu. Kalau engkau menasehati bapakmu seperti engkau menasehati anakmu, maka pasti orang lain akan mengingkari perbuatanmu.

Maka bagaimana kita tidak mempertimbangkan kedudukan pemerintah ketika menasehati mereka?

Demi Allah, seandainya tidak ada dalil syar'i yang menjelaskan tentang ini, maka cukuplah kaidah yang berlaku di masyarakat menjadi dalilnya. Yaitu bahwa

menasehati penguasa harus memperhatikan kedudukan mereka.

Terkait dengan mengingkari kemungkaran, maka **jika penguasa tersebut berada di tempat ketika dia melakukan kemungkaran, dan juga aman dari timbulnya fitnah, maka boleh mengingkari secara terbuka kemungkaran tersebut.**

Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Abu Sa'id - radhiyallahu 'anhu- kepada Marwan ibnul Hakam ketika shalat 'Id, ia ingin memulainya dengan khutbah dulu, maka dia pun naik mimbar. Maka Abu Sa'id mencegahnya dan mengatakan: "Shalat dulu!", namun Marwan tetap berkhotbah. Lalu Abu Sa'id menjelaskan kepadanya (di depan umum, -pent) bahwa yang sesuai sunnah dalam shalat 'Id adalah shalat dulu baru khutbah. Marwan mengatakan: "Jika demikian, nanti orang-orang tidak mau duduk kalau sudah shalat", yakni, -seperti yang kita lihat di masa sekarang- kalau kita shalat dulu, nanti orang-orang akan bubar dan setelahnya dan tidak mendengarkan khutbah. Maka aku (Marwan) ingin agar mereka mendengarkan khutbahku.

Tentu ini sebuah kesalahan dari Marwan, akan tetapi yang perlu dilihat di sini bahwa, karena yang hadir adalah orang-orang yang berakal, dan penguasa pun ada di situ, dan Abu Sa'id pun punya wibawa karena dia seorang sahabat Nabi, maka dia mengingkarinya secara terbuka.

Adapun jika tidak seperti itu keadaannya, maka mengingkari penguasa tidak dilakukan terang-terangan. Bahkan wajib secara syar'i untuk menyembunyikan nasehat dan tidak menampakkannya. Nabi -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda:

من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه

Barangsiapa ingin menasehati penguasa maka janganlah dia tampakkan terang-terangan. Hendaknya ia ambil tangannya dan berbicara berdua dengannya. Jika dia menerima maka itu yang diharapkan, dan jika tidak maka ia telah menunaikan kewajibannya"

Ya ikhwah, orang yang menasehati karena Allah, maka yang penting baginya adalah syariat Allah. Oleh sebab

itu, jika ia menasehati pemerintah, maka ia tidak menampakkannya, dan tidak memperlihatkannya di khutbah jumat, dan tidak pula di mimbar-mimbar atau di koran, atau di internet. Akan tetapi ia menasehatinya secara diam-diam. Kalau pemerintah menerima nasehatnya maka itulah yang diharapkan. Namun jika tidak, maka dia telah melakukan kewajibannya.

Maka dari itu, seorang ulama pernah mengatakan sebuah kalimat yang aku sering ulang-ulang, yang demi Allah layak ditulis dengan air mata -karena ia lebih mahal dari emas-:

إذا كنا عند ولي الأمر كنا للعامة، وأذا كنا عند العامة كنا لولي الأمر

"Jika kami sedang berada di sisi penguasa, kami berada di pihak rakyat. Dan jika kami sedang bersama rakyat, kami berada di pihak penguasa."¹⁹

¹⁹ Hal ini mengingatkan penulis akan nasehat Syaikh Shalih Al 'Ushaimi dalam dars beliau tanggal 7 Shafar 1438 / 8 November 2016, di mana beliau mengatakan:

والواجب على العالم أن يبين للرعية حقوق الراعي وأن يبين للراعي حقوق الرعية. فإذا كان الناس كذلك سلموا وإذا عدلوا عن ذلك وقعوا في الشرور

Artinya, ketika ada kesempatan bertemu penguasa, maka kami menasehatinya, memberinya wejangan, menjelaskan keadaan rakyat, intinya, kita berusaha menasehatinya.

Dan jika kami bersama rakyat, kami di pihak pemerintah. Mereka tidaklah mengatakan kepada rakyat: "Demi Allah kami telah menasehati pemerintah namun mereka tidak mau mendengarkan kami!", karena mereka menasehati karena Allah.

Akan tetapi mereka menasehati rakyat untuk mendengar dan taat kepada penguasa, mereka katakan: Alhamdulillah atas kebaikan yang banyak, dan semoga Allah menolong mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan kami memohon kepada Allah agar mereka mendapatkan penasehat yang shalih, dan semisalnya.

"Wajib bagi ulama untuk menjelaskan kepada rakyat mengenai hak-hak pemimpin mereka. Sedangkan kepada pemimpin, ia menjelaskan hak-hak rakyat atas dirinya.

Jika orang-orang bersikap demikian, maka mereka akan selamat. Dan jika mereka berbuat sebaliknya, mereka akan jatuh dalam keburukan."

Karena mereka menasehati pemerintah karena Allah 'Azza wa Jalla.

Lain halnya jika ia bukan Ahlus Sunnah: Boleh jadi ketika di depan penguasa, tidak terdengar sepatah katapun nasehat. Begitu sudah di luar bersama rakyat, ia bersuara keras menentanginya dan mencelanya.²⁰

²⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=25t9eRexOXQ>

Bagian Ketiga

Pertimbangan Maslahat dan Mafsadat

Berpikir Sebelum Berbicara

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin mengatakan:

"Seseorang dari suatu negeri menelponku sebelum maghrib tadi, Dia katakan, kebebasan kaum muslimin di Spanyol lebih baik dari negerinya. Dia juga mengatakan: Negeri kami mengharuskan memakai pakaian tertentu, dan melarang gamis, dan tidak membolehkan jenggot..

Sedangkan di Spanyol, dipersilakan pakai pakaian apa saja, silakan memelihara jenggot, silakan adzan untuk sholat dan shalat berjamaah.

Semua itu (awalnya) karena menyelisih penguasa. Karena memang kenyataannya, pemerintah lah yang punya kekuasaan. Apakah logis telur melawan batu? Atau seseorang menghadapi peluru dengan pisau dapur? Tidak benar yang seperti ini.

Maka seseorang hendaknya memutuskan sesuatu jangan berdasarkan api semangat saja. Akan tetapi dia lihat kepada maslahat dan mafsadah. Apakah hal itu akan menjadi gangguan bagi dirinya dan orang lain di

kemudian hari? Bahkan bisa menjadi batu sandungan bagi dakwah yang dia rintis? Dan juga bagi agama yang dia ingin tegakkan? Maka ini bukan masalah yang ringan."²¹

Kadangkala suatu perbuatan itu boleh dilakukan, namun karena pertimbangan mafsadah yang ditimbulkan, maka menjadi terlarang.

Kami (penulis) bertanya melalui Whatsapp kepada Syaikh Abdul Malik Al Jazairi -waffaqahullah-:

"Syaikh kami, semoga Allah senantiasa memberi taufiq kepada Anda. Sebagian da'i di negeri kami Indonesia, mencela sebagian menteri yang kafir melalui media sosial (Facebook), beralasan bahwa mereka bukan bagian dari ulil amri (karena kekafirannya, -pent), dan karena mereka tidak punya kehormatan. Apakah benar demikian?"

Beliau menjawab via audio yang kami transkrip sebagai berikut:

²¹ <https://www.youtube.com/watch?v=LlaIKxzAMDE> mulai menit ke-26

أقول نعم، إذا كان ولي الأمر كافراً ليس له ولاية على المسلم، لقول الله تعالى : ((ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)) لكن هذا السب حقيقةً يرجع إلى ما ينتج عنه، فإن ينتج عنه فتن، الخروج على الحاكم نفسه، إذا كان الحاكم مسلم لكن الوزراء كفار، فحينئذ لا يجوز مثل هذا السب. لا سيما إذا كان قد يؤدي إلى أن يزداد صاحب الشر شراً.. الله تعالى يقول: ((ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم))
والله أعلم.

Aku katakan: Benar, jika mereka kafir maka tidak ada wilaayah (kekuasaan) mereka atas kaum muslimin, berdasarkan firman Allah:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin" (QS An Nisa 141)

Akan tetapi, hukum celaan ini pada hakikatnya kembali kepada efek yang ditimbulkannya. Jika ia menimbulkan fitnah, dan pembangkangan kepada penguasa itu sendiri, yakni jika dalam kasus ini presiden-nya muslim

sedangkan menterinya kafir, maka dalam kondisi semacam ini tidak boleh.²²

Terlebih jika hal itu membuat orang yang buruk ini menambah keburukannya. Allah Ta'ala mengatakan:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Janganlah mencela sesembahan mereka selain Allah, sehingga mereka balik mencela Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu." (QS Al An'am 108)

Wallahu a'lam."²³

Di tempat lain beliau ditanya: “Bagaimana hukum mengingkari dan mengkritik pemerintah yang kafir secara terbuka?”

Jawab:

²² Dan ini pernah terjadi dalam sejarah. Ibnu Hajar mengatakan:

ان قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم

"Sesungguhnya pembunuhan Utsman, di antara penyebab terbesarnya adalah adanya celaan terhadap para gubernurnya, lalu kepada Utsman karena telah memilih mereka" (Fathul Bari 13/16)

²³ <https://youtu.be/e2LJKm9HMO>

“Tidak ada masalah. Akan tetapi dengan syarat harus melihat kepada maslahat dan mafsadat. Karena Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi menghadap penguasa kafir dan mengatakan kepadanya dengan perkataan yang lembut supaya dia sadar dan takut.

Dan sebelumnya Allah katakan: "Pergilah kalian ke Fir'aun", artinya, sampaikan itu di depannya. Bukan dari jauh.

Memang, tidak ada kehormatan bagi mereka dalam hal semisal ini, terutama kafir muharib (yang memerangi Islam dan kaum muslimin -pent). Akan tetapi tetap harus melihat pada maslahat dan mafsadat.

Jika dengan engkau mengingkari secara terbuka pemerintah kafir ini akan menghasilkan keburukan bagi kaum muslimin, maka diam lebih baik. Karena Allah Ta'ala mengatakan, yang artinya: "Janganlah engkau mencela sesembahan mereka selain Allah, sehingga

mereka balik mencela Allah tanpa ilmu.". Wallahu a'lam."²⁴

Pada akhirnya, semua harus mempertimbangkan kaidah-kaidah maslahat dan mafsadat. Tidak bisa disamaratakan hukumnya berupa mutlak boleh ataupun mutlak tidak boleh.

Kadangkala kondisi membolehkan kita mencelanya jika hal itu tidak mengarah pada celaan kepada pemimpin muslim, bahkan bisa menjadikan pemimpin muslim mencopot pejabat kafir tersebut karena keburukan yang dia lakukan.

Dan kadang pula hal itu tidak sepatutnya dilakukan jika yang menjadi korban adalah waliyyul amri muslim yang sepatutnya dijaga kehormatannya.

²⁴ <https://www.facebook.com/Abdulmalek.Ramdhani/videos/910023069422917/>

Bagian Keempat

Mengenai Murji'ah

Komentar Para Ulama tentang Julukan Murji'ah

Sebagian orang ketika diingatkan untuk tidak menjatuhkan penguasa, mereka membalas dengan sebutan Murji'ah. Sebenarnya siapa murji'ah?

Syaikh Al Albani pernah dimintai komentarnya mengenai para da'i penyelisih yang menggelari salafi dengan sebutan:

"Murjiah terhadap penguasa, Khawarij terhadap para da'i, Qadariyah terhadap Yahudi, dan Rafidhah terhadap jama'ah-jama'ah yang ada"

Beliau menjawab:

"Aku tidak bisa berkomentar apa-apa tentang kategorisasi yang empat ini, karena ia adalah pembagian yang mengada-ada, dibuat-buat, dan termasuk dalam yang aku sebutkan sebelumnya bahwa ia termasuk bermain-main dengan kata."

Dan selanjutnya beliau membantah masing-masing tuduhan tersebut.²⁵

Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin ditanya tentang julukan "Murji'ah pada penguasa" kepada mereka yang bersikap hati-hati dalam memvonis penguasa.

Beliau menjawab:

“Aku tidak suka hal ini terjadi pada sebagian ikhwan kepada yang lain. Dan aku menganggap ini termasuk menjuluki sesama muslim dengan julukan jelek.

Orang-orang yang tidak mau membicarakan penguasa di mimbar-mimbar, hal itu karena mereka tidak melihat adanya maslahat di situ. Dan memang itu kenyataannya.

Dan hal ini bukan berarti mereka membenarkan semua yang dilakukan penguasa. Mereka tetap mengakui bahwa penguasa adakalanya salah dan adakalanya benar.

²⁵<https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=7507>

Hanya saja, kita tidak kemudian naik mimbar di tengah-tengah masyarakat memberikan ceramah, ataupun di suatu acara khusus untuk mencela pemerintah, karena hal itu tidak ada manfaatnya.

Dan niat yang benar dalam menasehati adalah untuk memperbaikinya, bukan sekedar melepas kemarahan dan membalas dendam.

Siapa yang ingin memperbaiki penguasa, maka ia menempuh jalan yang benar untuk nasehat.

Adapun mereka yang sekedar melepas marah dan menghilangkan dahaga mereka untuk menangani hal ini, maka urusan berpulang kepada Allah 'Azza wa Jalla.

Kita tidak perlu mencari contoh mereka yang ingin mengoreksi penguasa tapi dengan cara naik mimbar dan mencela mereka, baik di pertemuan maupun di kajian. Kita tidak perlu untuk menyebutnya karena kenyataan sudah memperlihatkan hal tersebut.²⁶

²⁶ <https://ar.alnahj.net/audio/104>

Syaikh Shalih Al Fauzan ditanya: "Apakah benar pernyataan bahwa yang membela prinsip mendengar dan taat kepada pemimpin adalah penganut murji'ah?"

Beliau menjawab:

"Tinggalkan mereka. Ini omong kosong. Kita membela pemerintah muslim berdasarkan sunnah Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam- bahkan Al Quran.

Pemerintah yang muslim punya kehormatan dan juga kedudukan. Tidak boleh merendahkan mereka karena hal ini melemahkan persatuan dan menjadikan permusuhan antara penguasa dan rakyat, serta menyebabkan berbagai keburukan yang banyak. Maka perbuatan seperti ini tidak diperbolehkan selamanya. Na'am."²⁷

Bahkan dalam rangka menjaga aqidah ketaatan kepada penguasa, para ulama pun tak luput dari tuduhan menganggap maksum penguasa. Oleh sebab itu Syaikh Syaikh Shalih Al Fauzan menegaskan:

²⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=f9Dgra7V00E>

نحن لا نقول إن الولاة معصومون ولا يحصل منهم أخطاء ولا يحصل منهم ظلم لا نقول إن الشعوب ليس لها حقوق لا نقول هذا بل نقول الشعوب لها حقوق والولاة ليسوا معصومين ويحصل منهم ما يحصل ولكن ليس العلاج بالفوضى والمظاهرات

"Kami tidaklah mengatakan bahwa para penguasa itu maksum, dan bahwa mereka tidak pernah salah dan zhalim. Tidak pula kami katakan bahwa rakyat tidak punya hak-hak. Tidak demikian yang kami katakan. Akan tetapi justru kami katakan, rakyat punya hak, dan penguasa bukanlah orang yang maksum, dan mereka pun bisa keliru. Akan tetapi solusinya bukanlah dengan cara berbuat kekacauan, demonstrasi..."²⁸

²⁸ <https://www.alfawzan.af.org.sa/en/node/13215>



CINTA
SEDEKAH

www.cintasedekah.org

     @cspeduli